



WORLD BANK GROUP



INDONESIA
ECONOMIC
PROSPECTS

Mewujudkan Potensi Bisnis Indonesia

Ringkasan Eksekutif



Juni 2024

Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

Ringkasan Eksekutif

I. Perkembangan Ekonomi Terkini

Pertumbuhan PDB sebesar 5,1 persen pada Triwulan 1 (Tw1)-2024 tetap tangguh dan melampaui pertumbuhan rata-rata negara berpenghasilan menengah. Konsumsi swasta mencapai 57 persen dari pertumbuhan PDB, mencerminkan kepercayaan konsumen yang didukung oleh turunnya inflasi produk non-pangan, kenaikan upah pegawai negeri sipil, dan kinerja jasa konsumen yang baik. Konsumsi publik kembali menguat pada Tw1-2024 didorong oleh belanja pemilu dan belanja sosial. Penguatan ini melampaui kontribusi negatif ekspor netto akibat lemahnya permintaan global serta turunnya harga komoditas yang mengurangi pendapatan ekspor.

Inflasi kembali meningkat di 2024, setelah sempat turun di sepanjang 2023, akibat tekanan harga pangan. Inflasi utama (*headline inflation*) naik menjadi 2,8 persen *yoy* (*year-on-year*) pada bulan Mei namun tetap berada dalam target $2,5 \pm 1$ persen Bank Indonesia. Iklim yang buruk menyebabkan turunnya panen padi domestik dan berpengaruh pada harga pangan secara umum. Pemerintah meningkatkan upaya untuk meredam laju inflasi dengan menambah kuota impor beras tahun 2024 menjadi 4,1 juta ton (naik dari 3,1 juta ton di tahun 2023) dan memperpanjang program bantuan beras hingga bulan Juni. Kebijakan stabilisasi harga yakni harga eceran tertinggi beras yang diterapkan oleh Badan Pangan Nasional berimplikasi di luar harapan sehingga sempat mempengaruhi kurangnya pasokan. Sementara itu, subsidi BBM mampu menstabilkan tarif angkutan dan menurunkan inflasi jasa publik menjadi 1,0 persen *yoy*.

Kebijakan fiskal (*fiscal stance*) membaik di tengah meningkatnya belanja sosial dan menurunnya keuntungan dari kenaikan harga komoditas. Surplus APBN tercatat sebesar 0,1 persen dari PDB pada Tw1-24. Penerimaan turun sebesar 4,2 persen *yoy* akibat berkurangnya keuntungan dari kenaikan harga komoditas dan melambatnya kegiatan ekonomi. Tantangan efisiensi pajak telah mengurangi penerimaan dari kenaikan tarif PPN. Sementara itu, belanja naik 18 persen dari peningkatan belanja pegawai dan barang

sejalan dengan bertambahnya bantuan sosial untuk memitigasi dampak El-Nino terhadap harga pangan. Tekanan subsidi energi kembali muncul di tengah ketegangan geopolitik dan depresiasi mata uang. Meningkatnya tekanan belanja dan bertambahnya pembayaran bunga dapat mengesampingkan belanja prioritas dan pro-pertumbuhan, seperti investasi publik. Utang publik tercatat turun yakni 39 persen dari PDB, di mana 72 persen merupakan stok utang dalam mata uang domestik dan 88 persen akan jatuh tempo dalam kurun lebih dari setahun, sehingga mengurangi risiko mata uang dan *rollover*.

Bank Indonesia menerapkan kebijakan “suku bunga tinggi dengan kelonggaran makroprudensial” untuk menyeimbangkan upaya stabilitas mata uang dan ekonomi makro. Pada bulan April 2024, BI menaikkan suku bunga kebijakannya sebesar 25 bps, menjadi 6,25 persen—tertinggi sejak tahun 2016. Kenaikan suku bunga ini terjadi akibat penundaan penurunan suku bunga kebijakan di negara maju memicu arus keluar portofolio dan investasi lain secara signifikan, yang menyebabkan tekanan terhadap mata uang di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Situasi ini dibebani oleh meningkatnya permintaan domestik akan mata uang asing. Untuk menyeimbangkan dampak terhadap perekonomian, BI menggunakan insentif makroprudensial untuk mendukung pertumbuhan kredit. Termasuk memperluas cakupan diskon Rasio Cadangan wajib (*Reserve Requirement Ratio-RRR*) untuk sektor-sektor spesifik. Insentif likuiditas ini diperkirakan mampu meningkatkan kredit sektor swasta sebesar tambahan 1,6 persen pada akhir tahun 2024.

Ke depan, perekonomian diharapkan mampu bertumpu pada peningkatan konsumsi publik dan investasi di tengah tantangan melemahnya nilai tukar perdagangan. Pertumbuhan PDB diproyeksi mencapai rata-rata 5,1 persen pada periode 2024-26. Konsumsi akan terus mendorong pertumbuhan, didukung oleh peningkatan konsumsi publik seiring berjalannya program belanja sosial baru dari

pemerintahan mendatang. Inflasi utama diharapkan tetap stabil sebesar rata-rata 3 persen pada tahun 2024 dan 2,9 persen setelahnya, dan berada dalam kisaran target BI, di tengah tekanan harga pangan dan energi. Dengan meningkatnya belanja sosial dan investasi publik, defisit fiskal diperkirakan akan meningkat namun tetap dalam batas 3 persen dari PDB. Posisi eksternal akan masih dihadapi tantangan dari lambatnya pemulihan perdagangan global dan tekanan pembiayaan. Defisit transaksi berjalan diproyeksi akan melebar secara bertahap dan mencapai 1,6 persen dari PDB pada tahun 2026, seiring penurunan harga komoditas dan ketidakpastian global yang menghambat ekspor. Prospek ekonomi menghadapi berbagai risiko perlambatan. Suku bunga yang tinggi dapat membebani biaya pinjaman dan memperketat akses ke pembiayaan eksternal, dan meningkatkan biaya layanan utang publik. Guncangan eksternal seperti potensi intensifikasi konflik bersenjata atau ketidakpastian geopolitik dapat menyebabkan nilai tukar perdagangan turun lebih tajam daripada yang diperkirakan, sehingga pendapatan menjadi lebih rendah dan posisi fiskal menjadi lebih ketat.

Paket rencana belanja sosial pada program pembangunan lima tahun ke depan berpotensi memperbaiki pembentukan modal manusia dalam kerangka fiskal yang berkelanjutan. Implementasi bertahap program-program tersebut yang disertai dengan reformasi perpajakan, yang dapat menghasilkan tambahan penerimaan tahunan sebesar 1-1,5 persen dari PDB, akan membantu pemerintah mematuhi aturan fiskal yang berlaku. Aturan fiskal ini telah mendukung pengembangan kerangka kebijakan ekonomi makro yang transparan dan kredibel.

Kerangka kebijakan ekonomi makro yang penuh kehati-hatian dan konsisten telah menjadi landasan keberhasilan kinerja perekonomian Indonesia. Hal ini diakui oleh pasar. Misalnya, *credit default swap rate* dan *spread indeks obligasi pasar berkembang JP-Morgan (JP-Morgan Emerging Market Bond Index-EMBI)* untuk Indonesia terus menurun sejak pandemi dan lebih rendah daripada beberapa negara pembanding. Lembaga pemeringkat kredit juga telah mempertahankan peringkat layak investasi untuk kredit negara (*sovereign credit*), termasuk prospek stabil. Sehingga Indonesia berhasil mengatasi guncangan eksternal, menarik investasi, dan mendukung pertumbuhan.

Dalam konteks ini, reformasi untuk mendorong mobilisasi penerimaan domestik tetap menjadi prioritas utama. Pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan akan mendukung upaya ini. Namun, adanya kesenjangan pajak yang mencapai 6 persen dari PDB, mengisyaratkan reformasi tambahan perlu dilakukan untuk memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan, dan mengurangi sebaran sektor informal dunia usaha. Termasuk dengan menurunkan ambang batas pajak, menghapuskan pembebasan pajak yang tidak bermanfaat bagi rakyat miskin, dan memperbaiki mekanisme audit untuk meningkatkan kepatuhan. Dalam jangka menengah, penerimaan pajak juga dapat diperbaiki melalui pemanfaatan data pihak ketiga yang membantu memantau dan memverifikasi penghasilan/pendapatan. Selain kebutuhan untuk meningkatkan penerimaan, memperbaiki kualitas belanja juga berperan penting, terutama untuk perlindungan sosial, kesehatan, dan peningkatan modal manusia. Hal ini dapat dilakukan dengan merealokasi sumber daya dari program dan subsidi yang kurang efektif, seperti subsidi energi, kepada program perlindungan sosial yang melayani seluruh penduduk Indonesia sepanjang siklus kehidupannya. Sistem asuransi kesehatan nasional juga dapat ditingkatkan.

Selain tantangan siklus jangka pendek dan menengah, ada empat tantangan struktural pertumbuhan yang patut lebih diperhatikan. Selain menjaga fundamental ekonomi makro dalam lingkungan global yang semakin kompleks, penanganan keempat kendala struktural tersebut akan memperkuat hasil pembangunan pada dua dekade terakhir serta memastikan pertumbuhan mendatang akan lebih cepat dan lebih inklusif.

Pertama, konsentrasi manufaktur yang semakin meningkat menimbulkan tantangan daya saing. Peningkatan pangsa makanan dan minuman yang disertai dengan ekspansi beberapa industri berbasis komoditas telah mempersempit basis pertumbuhan ekonomi dan mengurangi diversifikasi di sektor manufaktur. Hal ini dapat menjadi sumber meningkatnya kerentanan terhadap kemerosotan sektoral (*sectoral downturns*) dan gejolak harga komoditas. Ekspansi yang menonjol dari industri logam dasar dan produk logam telah mencapai sepertiga pertumbuhan manufaktur selama tahun 2021-23. Sebaliknya, beberapa industri prioritas lain mengalami penurunan kinerja bila dibandingkan dengan rata-rata sebelum

pandemi COVID. Makanan dan minuman—yang selama ini menjadi kontributor terbesar nilai tambah manufaktur—mengalami perlambatan, sedangkan tekstil dan pakaian menghadapi tantangan yang semakin berat dari penurunan permintaan ekspor dan pengetatan pembatasan impor.

Kedua, meskipun secara nasional pertumbuhan tetap kuat, terdapat ruang untuk mempercepat konvergensi pendapatan daerah agar pertumbuhan yang inklusif dapat dipertahankan. Kemajuan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan daerah sejak tahun 1990an melambat dalam satu dekade terakhir. Selain itu, hanya ada sedikit kemajuan yang dicapai daerah-daerah lain dalam mengejar ketertinggalan mereka dengan Jawa-Bali. Divergensi pendapatan per kapita di Nusa Tenggara dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia telah menyebabkan ketimpangan pertumbuhan di wilayah Indonesia timur. Perlambatan konvergensi investasi turut menyebabkan terjadinya penyebaran dan dinamika disparitas pertumbuhan regional, khususnya ketika dibandingkan dengan Jawa-Bali yang telah mendorong tren investasi.

Ketiga, tren pasar tenaga kerja pasca pandemi COVID menunjukkan perlambatan kemajuan dalam mengurangi ketimpangan, setelah satu dekade peningkatan inklusi. Antara tahun 2015-19, Indonesia mencapai kemajuan penting dalam memastikan hasil pertumbuhan yang kuat menjadi lebih merata. Dalam periode ini, pertumbuhan semakin berpihak pada separuh jumlah penduduk termiskin dan mulai membalikkan tren ketimpangan yang terus meningkat pada dekade sebelumnya. Di kelompok 10 persen teratas, laju pertumbuhan konsumsi turun separuhnya, tetapi naik dua kali lipat di kelompok penduduk 10 persen termiskin. Pada tahun 2015, pertumbuhan di kelompok paruh terbawah melampaui kelompok paruh teratas untuk pertama kalinya dalam satu dekade. Kuatnya pasar tenaga kerja, bertambahnya imbalan atas keterampilan, dan naiknya upah di semua sektor menyebabkan turunnya Indeks Gini hampir 4 poin.

Akan tetapi, akibat COVID-19, Indeks Gini perlahan-lahan mulai naik lagi, dan sekarang mencapai 0,36. Dengan memperhitungkan inflasi, upah rata-rata masih belum sepenuhnya pulih ke level pra-pandemi.

Keempat, pertumbuhan inklusif membutuhkan mobilitas untuk menerima pekerjaan baru di sektor dan tempat yang memiliki produktivitas lebih tinggi. Secara tata ruang, Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat mobilitas terendah di dunia, dan kecenderungan ini semakin memburuk. Angka migrasi antar provinsi di Indonesia hanya mencapai 2,3 persen pada tahun 2023. Angka ini lebih rendah daripada sebelum pandemi, lebih rendah daripada rata-rata global 8 persen, dan masih jauh dari angka tertinggi yang mencapai 39 persen di beberapa negara bermobilitas tertinggi di dunia seperti Australia. Hal ini berkontribusi pada tidak terdapatnya konvergensi kesejahteraan jangka panjang antar pulau di Indonesia dalam dua dekade terakhir. Mobilitas yang mendukung berperan penting untuk menghubungkan pekerja dengan lapangan dan lokasi pekerjaan yang menawarkan pendapatan lebih tinggi dan standar hidup lebih baik.

Sejalan dengan upaya mengatasi dinamika ekonomi yang kompleks, langkah pertumbuhan selanjutnya adalah mendorong dinamisme sektor swasta. Mengatasi tantangan struktural dan memanfaatkan bidang pertumbuhan potensial sangat penting untuk mempertahankan kemajuan yang telah dicapai Indonesia. Hal ini membutuhkan fokus strategis untuk meningkatkan produktivitas, memperbaiki kerangka peraturan, dan memastikan pertumbuhan yang inklusif. Intinya adalah peranan sektor swasta yang siap menjadi pendorong signifikan bagi ekspansi dan inovasi perekonomian. Oleh karena itu, fokus harus bergeser pada perwujudan potensi bisnis Indonesia dan pengembangan sektor swasta yang tangguh dan dinamis sebagai penggerak Indonesia menuju status negara berprestasi tinggi.

II. Mewujudkan Potensi Bisnis Indonesia

Indonesia berada pada titik yang sangat penting dalam pembangunan ekonominya, dengan sektor swasta yang siap menjalankan peranan lebih besar dalam mendorong pertumbuhan dan inovasi. Untuk melampaui status sebagai negara berpenghasilan menengah, Indonesia harus mempercepat pertumbuhan tahunan menjadi lebih dari 6 persen. Artinya, Indonesia membutuhkan pertumbuhan produktivitas sebesar 3 persen—yaitu, satu poin persentase lebih tinggi daripada rata-rata saat ini. Agar tujuan ambisius mencapai status negara berpenghasilan tinggi dapat terwujud pada tahun 2045, sektor swasta dituntut untuk menjadi jauh lebih dinamis dan produktif. Laporan ini meneliti langkah yang dibutuhkan untuk menuju transformasi tersebut dengan menganalisis dinamika sektor swasta, mengevaluasi kinerjanya saat ini, mengkaji dampak dari reformasi regulasi, dan mengatasi tantangan-tantangan yang terus berlanjut.

Sektor swasta Indonesia ditandai oleh banyak perusahaan kecil namun didominasi secara ekonomi oleh beberapa perusahaan besar. Sektor swasta Indonesia sangat luas, terdapat 66 juta usaha, dengan 9 juta di antaranya terdaftar secara resmi. Sebagian besar sektor swasta terdiri dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang banyak bergerak di bidang perdagangan grosir dan ritel (54 persen), jasa akomodasi dan boga (20 persen), dan industri pengolahan (14,5 persen). Di sisi lain dari spektrum ukuran, bertahannya dominasi perusahaan-perusahaan raksasa telah memisahkan Indonesia dari negara-negara pembanding seperti India, Meksiko, Filipina, dan Turki. Perusahaan-perusahaan raksasa ini telah memainkan peranan signifikan dalam pembangunan Indonesia, namun mulai menunjukkan perlambatan dalam pertumbuhan produktivitasnya.

Sejumlah reformasi penting telah dilakukan untuk mendorong pembangunan sektor swasta, tetapi masih terdapat kesenjangan peraturan dan produktivitas. Indonesia telah menjalani proses transformasi sejak tahun 2015 dengan melaksanakan reformasi ekonomi yang signifikan untuk meningkatkan lingkungan usaha. Reformasi seperti Undang-undang Cipta Kerja tahun 2020 dan liberalisasi investasi telah menghasilkan perbaikan nyata. Pembentukan sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*-OSS) telah mengharmonisasi proses pendaftaran dan perizinan usaha, yang secara

signifikan mengurangi beban operasional usaha dengan menerapkan pendekatan berbasis risiko. Terlepas dari kemajuan ini, sektor swasta Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan. Ketidakpastian penerapan peraturan dan korupsi masih menjadi rintangan besar yang menghambat kelancaran kegiatan usaha. Hasil penilaian obyektif menunjukkan bahwa akses ke pendanaan dan biaya kepatuhan terhadap peraturan menjadi kendala produktivitas yang besar. Persepsi mengenai perbaikan layanan perizinan usaha dibayangi oleh bertambahnya waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan peraturan, sebuah tantangan yang signifikan bagi dunia usaha.

Tantangan pertama yang dihadapi perusahaan Indonesia adalah meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Kinerja perusahaan Indonesia dalam hal produktivitas tenaga kerja masih tertinggal dibandingkan dengan perusahaan di negara pembanding. Produktivitas tenaga kerja menurun dari USD 7.530 per pekerja pada tahun 2015 menjadi USD 5.336 pada tahun 2023, sebagian karena dampak ekonomi pandemi COVID-19. Perusahaan Indonesia juga memiliki tingkat penjualan rata-rata dan angka lapangan kerja yang lebih rendah dibandingkan dengan Turki, Meksiko, dan India.

Potensi pertumbuhan mengalami penurunan akibat melemahnya input tenaga kerja, pembentukan modal manusia, dan pertumbuhan produktivitas. Meskipun investasi dan tenaga kerja sebelumnya menjadi pendorong pertumbuhan, terjadi penurunan pasca pandemi yang berdampak pada produktivitas faktor total (*total factor productivity*-TFP). Pertumbuhan TFP pada tahun 2010an hanya separuh dari pertumbuhan tahun 2000an. Penurunan TFP dan modal manusia selaras dengan penurunan pertumbuhan produktivitas tenaga kerja (lihat Prospek Ekonomi Indonesia Juni 2023 untuk informasi lebih lanjut). Temuan ini menandakan pentingnya meningkatkan produktivitas sektor swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan dengan produktivitas tenaga kerja yang semakin meningkat.

Tantangan kedua adalah dominasi pasar oleh perusahaan besar yang menunjukkan penurunan pertumbuhan produktivitas. Salah satu ciri penting dari sektor swasta Indonesia adalah ukuran perusahaan dan ketimpangan kinerja yang mencolok. Beberapa

perusahaan besar mendominasi pasar, sementara sebagian besar usaha tetap berukuran kecil dan kurang produktif. Dalam 31 tahun terakhir, kelompok 5 persen teratas perusahaan manufaktur besar terus mengakumulasi pangsa pendapatan yang sangat besar. Hal ini tidak menjadi masalah jika perusahaan bertumbuh dengan meningkatkan produktivitasnya sehingga memberi efek pengganda yang kuat pada perekonomian melalui lapangan pekerjaan yang lebih baik, hubungan rantai pasokan, inovasi, dan dampak limpahan lainnya.

Secara global, perusahaan yang lebih besar dari aspek penjualan tahunannya, menghasilkan lebih banyak lapangan pekerjaan. Namun hubungan ini nampak lebih lemah di Indonesia dibandingkan dengan di negara-negara pembanding. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan perusahaan besar Indonesia tidak menghasilkan peningkatan lapangan pekerjaan sebanyak di negara lainnya. Namun, perusahaan besar Indonesia menawarkan upah yang lebih tinggi daripada perusahaan yang lebih kecil, kecenderungan yang juga terjadi di negara pembanding. Selain itu, perusahaan besar Indonesia memiliki inefisiensi dalam alokasi sumber daya, khususnya penggunaan tenaga kerja dan modal dibandingkan dengan pangsa pasar mereka. Sementara pada negara pembanding, inefisiensi semacam ini tidak menonjol.

Tantangan ketiga adalah mengatasi ketidakpastian mendasar dan bias dalam pelaksanaan peraturan. Ketidakpastian menyebabkan diskresi bagi para penegak mandat pemerintah. Diskresi berujung pada suap dan korupsi, yang terus menghambat produktivitas perusahaan karena mengalihkan sumber daya dari investasi dan menambah beban operasional. Perusahaan besar memiliki kemampuan lebih baik untuk mengatasi friksi ini disebabkan sumber daya keuangan dan administrasi yang lebih baik. Mereka mampu mendanai tim khusus bidang hukum dan kepatuhan

untuk menafsirkan dan menjalankan peraturan dan mengurangi biaya kepatuhan. Sebaliknya, perusahaan yang lebih kecil seringkali kekurangan sumber daya dan keahlian untuk menavigasi lanskap peraturan yang terus berubah sehingga berdampak pada biaya kepatuhan yang relatif lebih tinggi. Ketidakpastian menyebabkan seluruh perusahaan dihadapkan dengan korupsi dan lebih membebani perusahaan yang lebih kecil.

Meningkatkan konsistensi peraturan dan mengembangkan akses ke pasar internasional adalah yang utama untuk mewujudkan potensi sektor swasta Indonesia serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk meningkatkan konsistensi peraturan, sangat penting untuk membangun lingkungan peraturan yang lebih dapat diprediksi. Ini mencakup penerapan aturan yang konsisten di seluruh daerah dan sektor untuk mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan dunia usaha. Sementara itu, untuk mengembangkan Akses ke Pasar Internasional, kemudahan akses ke pasar global dapat meningkatkan daya saing perusahaan Indonesia dan menjadikan perusahaan besar lebih produktif. Kebijakan yang mengintegrasikan perusahaan lokal ke dalam rantai nilai dan rantai pasokan global membutuhkan peningkatan teknologi, manajemen, dan produksi yang semakin ramah lingkungan (hijau).

Dengan menanggulangi inti masalah tersebut, Indonesia dapat menciptakan sektor swasta yang lebih dinamis dan tangguh, yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Perjalanan menuju Indonesia yang lebih makmur membutuhkan upaya berkelanjutan dan komitmen untuk melaksanakan reformasi agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara luas oleh seluruh segmen masyarakat.

Tabel 1: Indikator-indikator Makroekonomi Terpilih

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Aktual				Proyeksi WB			
Pertumbuhan PDB Riil dan Inflasi, persen perubahan year-on-year								
PDB Riil	5.0	-2.1	3.7	5.3	5.0	5.0	5.1	5.1
Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) (rata-rata, %)	2.8	2.0	1.6	4.1	3.7	3.0	2.9	2.9
Neraca Keuangan Publik, Pemerintah Pusat, persen PDB								
Pendapatan	12.4	10.7	11.8	13.5	13.3	12.9	13.1	13.2
di antaranya Pendapatan Pajak	9.8	8.3	9.1	10.4	10.3	10.5	10.7	10.8
Belanja	14.6	16.8	16.4	15.8	14.9	15.4	15.6	15.6
Keseimbangan Primer	-0.5	-4.1	-2.5	-0.4	0.4	-0.2	-0.1	0.0
Keseimbangan Fiskal	-2.2	-6.1	-4.6	-2.4	-1.7	-2.5	-2.5	-2.4
Utang Pemerintah Pusat	30.2	39.3	40.7	39.5	39.0	39.0	39.1	38.9
Neraca Pembayaran, persen PDB kecuali dinyatakan sebaliknya								
Keseimbangan Transaksi Berjalan	-2.7	-0.4	0.3	1.0	-0.1	-0.9	-1.4	-1.6
Penanaman Modal Asing Netto	1.8	1.3	1.5	1.4	1.1	1.3	1.4	1.5
Cadangan Devisa Bruto (bulan, impor barang dan jasa)	7.6	10.2	8.0	6.0	6.5	6.8	6.6	6.4



Australian Government

Supported by funding from the Australian
Government through the Australia-World Bank
Indonesia Partnership (ABIP)